

TUGAS PAPER KELOMPOK
SUB CPMK 3 PEKAN V
HAKEKAT DAN PENGALAMAN SILA II & V



Dosen Pengampu:

Afni A, S.IP., M.AP

Disusun oleh:

Mohamad Alief Nauval Mohi	D121241001
Aisha Azqifah	D121241013
Ahmad Nur Alim	D121241023
Raja Afraddiaz	D121241033
Imtyas Qanita Rahman	D121241043
Andi Raihan Fayad Subhan	D121241053
Gabriel Kole	D121241065
Isyraq Awwal Uthorid	D121241075
Andi Suci khairunnisa	D121241085
Nahdah Fauziah Chaidir	D121241099
Yones Dumupa	D121241113

DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

GOWA

2025

I. CONTOH PERMASALAHAN DAN SOLUSI

A. PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI ERA REFORMASI

Era Reformasi membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan Indonesia, termasuk dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, masih terdapat kebijakan dan regulasi yang belum sepenuhnya melindungi hak-hak individu, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Kasus seperti Tragedi 1998, Peristiwa Semanggi, dan penculikan aktivis masih belum terselesaikan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia masih menghadapi kendala dalam menegakkan keadilan bagi para korban.

Selain itu, tindakan represif oleh aparat negara masih menjadi permasalahan serius. Kekerasan terhadap demonstran, intimidasi terhadap aktivis, serta pembatasan kebebasan berekspresi semakin memperlihatkan lemahnya penegakan HAM di Indonesia. Banyak jurnalis dan aktivis yang mengalami ancaman atau kriminalisasi saat mengungkap ketidakadilan. Tidak hanya itu, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun hukum, juga masih terjadi, menunjukkan belum meratanya penerapan prinsip-prinsip HAM dalam kehidupan masyarakat.

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya HAM juga menjadi faktor penghambat. Banyak individu tidak menyadari hak-hak mereka sebagai warga negara, sehingga sulit bagi mereka untuk memperjuangkan keadilan. Selain itu, masih terdapat kebijakan dan regulasi yang belum sepenuhnya melindungi hak-hak individu, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.

B. SOLUSI

Untuk memperbaiki kondisi penegakan HAM di Indonesia, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, serta masyarakat. Salah satu langkah utama adalah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang masih tertunda. Pemerintah harus berkomitmen untuk membawa para pelaku ke pengadilan dengan proses yang transparan dan adil. Penguatan lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga penting untuk memastikan hak-hak korban dapat dipenuhi.

Selain itu, reformasi di institusi penegak hukum harus terus dilakukan. Aparat keamanan perlu diberikan pelatihan khusus tentang prinsip-prinsip HAM agar mereka dapat menjalankan tugas dengan lebih humanis dan profesional. Mekanisme pengawasan terhadap tindakan represif juga harus diperketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks kebebasan berekspresi, pemerintah harus menjamin bahwa setiap warga negara dapat menyampaikan pendapatnya tanpa takut mengalami intimidasi atau kriminalisasi.

Peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang HAM juga menjadi kunci utama dalam membangun budaya yang menghormati hak-hak individu. Kurikulum pendidikan harus mengintegrasikan materi HAM secara lebih mendalam, sehingga sejak dini masyarakat dapat memahami pentingnya keadilan dan persamaan hak. Kampanye dan sosialisasi mengenai HAM juga harus diperluas melalui berbagai media agar dapat menjangkau lebih banyak orang.

Terakhir, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan dan regulasi yang dibuat benar-benar berpihak pada perlindungan HAM. Setiap kebijakan yang berpotensi melanggar HAM harus ditinjau ulang, dan kebijakan baru harus disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penegakan HAM di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan menciptakan masyarakat yang lebih demokratis serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

II. INTISARI VIDEO: HAKIKAT SILA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

Ketidakadilan hukum di Indonesia menekankan bahwa meskipun Pancasila, khususnya sila kelima tentang keadilan sosial, seharusnya menjamin hak yang sama bagi seluruh rakyat, kenyataannya banyak masyarakat yang masih mengalami ketidakadilan. Hukum di Indonesia sering kali tidak berpihak, di mana mereka yang memiliki kekayaan atau status sosial lebih tinggi dapat menghindari konsekuensi hukum, sementara masyarakat kelas bawah menghadapi sanksi yang berat atas pelanggaran kecil. Kasus nenek Minah yang dihukum karena mencuri kakao menjadi contoh nyata dari fenomena ini. Untuk memperbaiki kondisi ini, diperlukan pendidikan karakter yang kuat dan peningkatan kualitas seleksi aparat penegak hukum agar mereka memiliki integritas tinggi. Selain itu, praktik penegakan hukum yang adil dan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu sangat penting untuk memastikan akses yang setara terhadap keadilan. Apresiasi terhadap aparat penegak hukum juga dapat meningkatkan motivasi mereka untuk bertindak adil. Dengan upaya-upaya

tersebut, diharapkan cita-cita hukum yang adil dan merata dapat terwujud, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

III. DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman S. (n.d.). Reformasi Penegakan HAM di Indonesia. Universitas Jambi.

Masykuri A. (2014). Islam Dan Hak Asasi Manusia: Penegakan dan Problem HAM di Indonesia. MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman.

RS Tarigan. (2024). Reformasi Hukum Tata Negara: Menuju Keadilan dan Keseimbangan. Google Books.

S Pakaya, I Hadi. (2023). Hak Warga Negara Untuk Dilindungi sebagai hak asasi manusia dalam konstitusi. At-Tanwir Law Review.